

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pemahaman Tentang Perubahan Mata Pencaharian**

##### **1. Perubahan**

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini perubahan akan terus terjadi. Perubahan menjadi suatu proses di mana suatu kondisi, situasi, atau keadaan berubah dari satu bentuk atau keadaan menjadi yang lain. Perubahan bisa terjadi kearah yang positif dan negatif dimana perubahan bisa bersifat progresif, di mana ada peningkatan atau perkembangan, atau bisa juga bersifat regresif, di mana terjadi penurunan atau kemunduran. dan akan terlihat jelas jika struktur dan cara hidup sosial saat ini dikontraskan dengan tatanan sosial sebelumnya.

Perubahan menurut definisi dari KBBI, merujuk pada proses transformasi dari keadaan awal menjadi keadaan yang berbeda. Proses ini melibatkan peralihan dari keadaan statis menuju keadaan dinamis yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berubah, bahwa mereka dapat menggunakan teori atau konsep terbaru untuk mencapai tujuan mereka.

Cara lain untuk melihat perubahan adalah sebagai komponen mendasar dari pengembangan pribadi, yang membuka pintu menuju kemajuan yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap orang harus mampu meramalkan perubahan dan meresponsnya dengan fleksibel. Dengan

demikian, perubahan dianggap sebagai suatu proses yang membawa peluang menuju peningkatan, serta sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sosial pada tingkat individu maupun organisasi.

Sedangkan penyesuaian dapat mencakup wilayah yang luas dan spesifik, menurut Nanang Martono (2012). Perubahan pada tingkat struktur masyarakat dapat dianggap sebagai faktor luas yang akan berdampak pada pertumbuhan masyarakat di masa depan.

## **2. Definisi Perubahan Mata Pencaharian**

Setiap anggota masyarakat perlu memiliki sumber pendapatan atau mata pencaharian utama untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, penghidupan sendiri didefinisikan oleh Supriyadi (2007:20) sebagai pekerjaan mendasar yang dilakukan manusia untuk bertahan hidup serta sumber daya yang tersedia untuk menciptakan kehidupan yang memuaskan (meningkatkan standar hidup), dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti mengawasi bagaimana sumber daya, institusi, dan hubungan politik digunakan. Mata pencaharian seseorang sering kali berubah selama masa pertumbuhannya karena berbagai alasan, baik internal, eksternal, atau keduanya.

Pembenaran ini menunjukkan bahwa transformasi pekerjaan adalah istilah lain untuk perubahan mata pencaharian. Manusia mengubah cara hidupnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perubahan orientasi penghidupan digambarkan sebagai pergeseran mental yang akan berdampak pada tindakan masyarakat di

masa depan, seperti beralih dari pekerjaan utama di sektor pertanian ke sektor non-agraria, menurut Fajar Hatma (2003:37).

Perubahan mata pencaharian seseorang atau suatu komunitas dapat disebut sebagai pergeseran mata pencaharian bisa melibatkan perubahan dari satu sektor ekonomi ke sektor lainnya, perubahan dalam jenis pekerjaan atau industri yang dijalankan, atau bahkan perubahan dalam cara individu memperoleh penghidupan.

Perubahan mata pencaharian bisa dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi, teknologi, perubahan sosial, dan kebijakan pemerintah. Misalnya, dengan adopsi teknologi baru, beberapa pekerjaan tradisional dapat menjadi uang sementara pekerjaan baru muncul dalam sektor-sektor yang berkembang pesat seperti teknologi informasi atau energi terbarukan. Selain itu, perubahan dalam struktur sosial atau kebutuhan pasar juga dapat mendorong individu untuk beralih ke pekerjaan yang berbeda.

Penting untuk memahami bahwa perubahan mata pencaharian tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan dan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perubahan mata pencaharian penting dalam merencanakan kebijakan ekonomi, pendidikan, dan pelatihan tenaga kerja.

Transformasi adalah hal yang umum terjadi di masyarakat, dan biasanya terjadi melalui proses bertahap yang ditandai dengan gejala

spesifik atau tindakan pencegahan. Misalnya, desa-desa lambat laun mulai menyerupai kota. Kemudian, penyesuaian dapat direncanakan secara sadar dan metodis, namun dapat juga terjadi secara spontan tanpa adanya perencanaan atau pengawasan sebelumnya.

Setiap modifikasi terhadap bentuk akan menyingkirkan bentuk lama dan maju ke arah bentuk baru yang diharapkan. Membandingkan serangkaian keadaan tertentu dengan keadaan historis masyarakat memungkinkan identifikasi perubahan juga.

Hal serupa juga terjadi di Desa Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, yang mayoritas penduduknya kini bermata pencaharian sebagai pedagang, bukan petani, setelah sebelumnya mengalami transformasi atau perubahan mata pencaharian.

## **B. Pemahaman Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga**

### **1. Pemberdayaan**

Istilah “kekuasaan” menunjukkan kekuatan atau kemampuan, dan dari sinilah kata pemberdayaan mendapatkan etimologinya. Dengan pengetahuan tersebut, pemberdayaan dapat dipahami sebagai suatu proses yang mengarah pada pemberdayaan atau sebagai cara untuk memperoleh kekuatan, kekuasaan, dan kemampuan. Dengan kata lain, pemberdayaan dapat dipahami sebagai proses memperoleh kekuasaan dan memindahkannya dari pihak yang memiliki kepada pihak yang menerimanya.

Menurut Stewart (2008: 18), pemberdayaan berasal dari kata bahasa Inggris pemberdayaan yang berasal dari kata power yang berarti kemampuan untuk menjamin terjadinya sesuatu atau tidak terjadi sama sekali. Pemberdayaan adalah proses memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada mereka yang lemah atau tidak beruntung.

Mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran akan potensi, inisiatif pemberdayaan ini berupaya untuk membentengi masyarakat. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memaksimalkan potensi masyarakat secara keseluruhan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan menumbuhkan suasana yang mendukung bagi masyarakat yang menjalani proses tersebut.

Menurut Mardikanto (2014:134), pemberdayaan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara bertahap; itu tidak bisa terjadi sekaligus. Hal ini sebagai upaya memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada masyarakat. Kemampuan mereka yang telah berintegrasi ke dalam masyarakat untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat guna menemukan strategi baru bagi pertumbuhan masyarakat adalah cara lain untuk menjelaskan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan “proses” adalah rangkaian tindakan atau proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencerminkan tahapan upaya transformasi masyarakat yang kurang mempunyai kewenangan menjadi masyarakat yang berdaya.

Menurut teori pemberdayaan Edi Suharto (2010), pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membantu pemberdayaan kelompok marginal dalam masyarakat, seperti mereka yang berjuang melawan kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan ini mengacu pada keadaan atau pertumbuhan perubahan sosial, yaitu individu yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan material, ekonomi, dan sosialnya, seperti memiliki sarana penghidupan, menyampaikan aspirasi, percaya diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas kehidupan. Gagasan bahwa seseorang dapat diberdayakan.

Dalam interpretasinya terhadap gagasan pemberdayaan masyarakat, Edi Suharto (2014) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu proses dan tujuan itu sendiri. Pemberdayaan adalah proses penguatan kekuasaan atau pemberdayaan kelompok marginal dalam masyarakat, termasuk mereka yang berjuang melawan kemiskinan. Hal ini juga mengacu pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial: individu yang mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka—baik materi, sosial, atau budaya—dan yang mampu menghidupi diri sendiri, terlibat dalam masyarakat, dan menyelesaikan tugas-tugasnya. mereka sendiri.

Suharto (2005:59–60) mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses dan hasil akhir. Sebagai sebuah proses, pemberdayaan

diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kewenangan atau pemberdayaan kelompok marginal dalam masyarakat, seperti mereka yang berjuang melawan kemiskinan.

Zaenal Mukarom dan Rohmanur Aziz (2023: 115) mengartikan pemberdayaan sebagai proses pemberian kemampuan kepada seseorang untuk mengambil bagian, mengelola, dan memberi dampak pada kehidupannya sendiri. Proses pemberdayaan sangat menekankan pada nilai orang yang memperoleh kemampuan, informasi, dan pengaruh yang dapat meningkatkan taraf hidup orang yang menjadi pusat perhatian. Untuk memungkinkan masyarakat mengendalikan kehidupannya, komunitas, organisasi, dan masyarakat dapat memberdayakan masyarakat.

Perspektif ini membawa pada kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah serangkaian tindakan yang dimaksudkan untuk membangun komunitas yang kuat melalui keterlibatan dan kerjasama antara komunitas dan mitra lainnya. Masyarakat akan memperoleh kepercayaan diri, kemampuan mengutarakan pendapat, penghidupan, kemampuan melakukan kegiatan sosial, dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Pemberdayaan dapat dipahami dari beberapa sudut pandang tersebut sebagai upaya untuk memperoleh kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan, atau sebagai langkah menuju pemberdayaan. Hal ini juga

mencakup proses dimana mereka yang memiliki sumber daya mentransfer kekuasaan, kekuatan, atau bakat mereka kepada mereka yang kurang berkuasa, tidak berdaya, atau belum mempunyai kekuasaan. Menurut Suhartini, tujuan pemberdayaan adalah:

- a. Terjadi perbaikan pada bidang lingkungan hidup baik fisik, sarana dan prasarana serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- b. Pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuan untuk menumbuhkan kemampuan atau kreativitas masyarakat yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.
- c. Selain itu pemberdayaan juga mempunyai tujuan lain yaitu membantu masyarakat mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan sehingga terjamin perekonomian keluarga.

Mardikanto (2014:134) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya untuk memperkuat atau memberdayakan masyarakat. Kemampuan individu untuk bekerja sama dengan masyarakat untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bercita-cita untuk mengidentifikasi pilihan-pilihan baru dalam pengembangan masyarakat merupakan definisi lain dari pemberdayaan masyarakat.

Suharto (2005:60) menjelaskan pemberdayaan masyarakat juga dapat dipahami sebagai suatu prosedur dan tujuan.



- a. Sejumlah tindakan yang ditujukan untuk memperkuat kelompok-kelompok marginal dalam masyarakat, seperti kelompok yang menangani kemiskinan, dimasukkan dalam proses pemberdayaan.
- b. Tujuan akhir dari pemberdayaan adalah untuk mencapai kondisi perubahan sosial, yaitu pengembangan individu yang mampu, berpengetahuan, berkuasa, dan cukup terampil untuk memenuhi tuntutan dasar mereka dalam hal kesejahteraan fisik, finansial, dan sosial. Hal ini mencakup hal-hal seperti memiliki rasa percaya diri, mengungkapkan tujuan, mencari nafkah, berpartisipasi dalam acara sosial, dan mandiri dalam melakukan pekerjaan sehari-hari.

Para ahli menyebutkan beberapa pengertian pemberdayaan sebagai berikut:

- a. Ife mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap anggota organisasi, yang memotivasi orang untuk menggunakan kreativitas untuk menyelesaikan pekerjaannya secara efektif.
- b. Friedman mengklaim bahwa pembangunan alternatif menekankan pentingnya politik dengan memberdayakan individu untuk membuat keputusan otonom yang melindungi kepentingan mereka berdasarkan sumber daya mereka sendiri melalui keterlibatan demokratis dan pembelajaran sosial langsung.

- c. Pemberdayaan menurut Priyono dan Pranaka adalah pemerataan kekuasaan untuk memperkuat kesadaran dan otoritas politik kelompok lemah serta berdampak pada proses pembangunan.

Sifat- sifat yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. Berfokus atau berorientasi pada kepentingan masyarakat (*people centered*), ini merujuk pada kebutuhan masyarakat dan melibatkan mereka dalam proses pelaksanaannya. Masyarakat juga diberikan kesempatan sebagai subjek yang aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan program kegiatan, serta dalam pemantauan dan pelaporan yang transparan yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat.
- b. Partisipatif (*participatory*), hal ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting untuk mewujudkan tujuan dan aspirasi mereka, serta agar mereka terlibat dalam proses pemberdayaan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri.
- c. Pemberdayaan (*empowering*), ini menekankan bahwa pemberdayaan harus diketahui, dipahami, dan disosialisasikan secara merata kepada masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui dan memahami proses pemberdayaan yang sedang dilakukan.
- d. Berkesinambungan (*sustainable*), pemberdayaan harus memiliki keberlanjutan dalam setiap tahapan dan konteks ruang dan waktu yang berkelanjutan.

Mengenai tahapan pemberdayaan, Ambar Teguh Sulistyani yang dikutip oleh Aziz Muslim (2012; 33–34) menyatakan bahwa tahapan pemberdayaan perlu dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap Penyadaran dan Pembentukan Perilaku

Agar mereka merasakan kebutuhan untuk mengembangkan kapasitas mereka sendiri, mereka harus menyadari pentingnya tindakan yang penuh perhatian dan kasih sayang. Pada titik ini, penting untuk memberi tahu orang yang menerima pemberdayaan tentang perlunya mengubah keadaan saat ini agar keadaannya menjadi lebih baik. Sedikit kesadaran dapat membangkitkan keinginan dan kesadaran yang lebih besar terhadap keadaan pada saat itu, yang kemudian dapat mendorong kesadaran akan perlunya mengubah keadaan guna membangun masa depan yang lebih baik. Untuk memberdayakan mereka yang menjadi sasaran pemberdayaan untuk mengubah perilakunya, maka perlu adanya peningkatan kesadaran akan hal ini.

b. Tahap Transformasi Pengetahuan dan Kecakapan Keterampilan

Dalam hal ini, perolehan berbagai informasi dan kemampuan diperlukan untuk membantu inisiatif pemberdayaan yang sedang dilakukan. Sasaran pemberdayaan akan memiliki informasi, kemampuan, dan keterampilan yang menambah potensi yang dimilikinya. agar pemberdayaan dapat berjalan kedepannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

c. Tahap Peningkatan Kemampuan Intelektual dan Kecakapan Keterampilan

Tujuan pemberdayaan pada tahap pengembangan bakat dan keterampilan intelektual adalah untuk lebih mengembangkan kemampuan yang telah dimiliki, meningkatkan keterampilan dan kemampuan, dan pada akhirnya berujung pada kemandirian.

Ambar Teguh Sulistyani mengatakan tahap pemberdayaan pada akhirnya diselesaikan dalam tiga tahap, yakni penyadaran, transformasi pengetahuan dan keterampilan, serta peningkatan kapasitas intelektual dan kompetensi keterampilan. Sementara itu, pemberdayaan masyarakat memerlukan tujuh tahapan atau tindakan, menurut Soekanto (1987:63):

a. Tahap Persiapan.

Saat ini ada dua hal yang perlu dilakukan: pertama, menjaga petugas, atau tenaga pemberdayaan masyarakat, yang bisa dilakukan oleh pekerja masyarakat; dan kedua, menyiapkan lapangan, yang hakikatnya merupakan upaya yang dilakukan secara non-direktif.

b. Tahapan Pengkajian (*Assessment*).

Pada titik ini, prosedur evaluasi dapat diselesaikan secara mandiri dengan menggunakan kelompok sosial. Dalam situasi ini, petugas harus melakukan upaya untuk menentukan sumber daya klien serta masalah kebutuhan yang dirasakan.

c. Tahap Perencanaan Alternatif Program Atau Kegiatan.

Situasi ini menuntut petugas untuk bertindak sebagai agen pertukaran partisipatif, yang memungkinkan masyarakat untuk secara bebas berdiskusi mengenai permasalahan yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini, masyarakat diharapkan dapat mencermati beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.

d. Tahap Pemformalisasi Rencanaaksi.

Pada titik ini, agen perubahan membantu setiap kelompok dalam merumuskan dan memilih inisiatif dan tindakan yang akan mereka terapkan untuk mengatasi permasalahan saat ini. Selain itu, petugas membantu memformalkan konsep mereka ke dalam dokumen tertulis, terutama ketika mengajukan penawaran kepada pemberi dana.

e. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program Atau Kegiatan.

Peran masyarakat sebagai kader diyakini mampu menopang kelangsungan program yang dirancang dalam upaya melaksanakan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Pada titik ini, kerja sama antara penegak hukum dan masyarakat menjadi sangat penting karena rencana yang telah disusun dengan baik terkadang bisa menjadi kacau di lapangan.

f. Tahap Evaluasi

Melibatkan masyarakat setempat dalam proses evaluasi sebagai sarana pengawasan petugas dan warga terhadap kelanjutan program pemberdayaan masyarakat adalah hal yang penting. Hal ini dimaksudkan agar keterlibatan masyarakat, dalam banyak kasus, akan menghasilkan pembentukan sistem pengawasan internal masyarakat dalam jangka menengah dan, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, pengembangan komunikasi masyarakat yang lebih baik dalam jangka panjang.

g. Tahap Terminasi.

Tahap pemisahan resmi dari komunitas sasaran dikenal dengan tahap terminasi. Proyek ini diperkirakan harus segera diakhiri pada saat ini.

Membangun kapasitas masyarakat dan memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelayanan, penyuluhan, dan pendampingan merupakan dua cara untuk mencapai pemberdayaan masyarakat. Ada tiga hal yang perlu dilakukan agar pemberdayaan menjadi efektif: menciptakan lingkungan dimana potensi kemampuan dapat tumbuh; meningkatkan potensi atau kemampuan; dan menjaga komunitas. Sebagai bagian dari tim pendukung proses pemberdayaan, diperlukan fasilitator multidisiplin. Salah satu variabel luar dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah hal ini. Karena proses

pemberdayaan berbasis kelompok, intervensi fasilitator berbasis kelompok tidak mungkin dilakukan untuk semua intervensi fasilitator.

Upaya yang dilakukan untuk membangkitkan kesadaran suatu individu yaitu dengan membawanya keruang lingkup yang lebih luas seperti, bidang sosial dan bidang politik sehingga individu tersebut akan melihat permasalahan, aspirasi, impian, serta kekecewaan mereka dari sudut pandang sosial dan politik yang lebih makro.

Untuk memahami tujuan pemberdayaan, diperlukan indikator yang dapat membantu menilai apakah seseorang sudah berdaya atau belum. Kesejahteraan ekonomi suatu masyarakat dianggap berdaya jika memenuhi satu atau beberapa kriteria, diantaranya:

- a. Berkemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasar.
- b. Berkemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Berkemampuan dalam menghadapi serangan dan ancaman dari luar.
- d. Berkemampuan untuk melakukan kreasi serta inovasi sebagai bentuk aktualisasi diri dan menjaga eksistensi sebagai bangsa negara.

Menurut Gunawan indikator yang dapat mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Tingginya rasa kepedulian yang dimiliki masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dilingkungannya.

- b. Peningkatan tingkat kemandirian masyarakat dapat diamati dari berbagai indikator, seperti peningkatan produktivitas individu dalam komunitas, penguatan modal, dan peningkatan kualitas administrasi.
- c. Memberikan lebih banyak uang kepada keluarga-keluarga yang sebelumnya miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan lainnya mungkin juga menunjukkan rasa kebersamaan yang lebih kuat dan alokasi sumber daya yang lebih adil.

Berdasarkan metrik ini, seseorang dapat dianggap berdaya jika ia mampu memenuhi kebutuhan pribadinya, menciptakan kesejahteraan di lingkungan sekitarnya, dan secara efektif mewujudkan sifat-sifat yang terkait dengan pemberdayaan.

Menurut Haris (2014:60), untuk memahami lebih dalam mengenai strategi yang digunakan dalam proses pemberdayaan masyarakat, maka strategi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti: Pendekatan masyarakat didahulukan. Kedua, strategi yang luas. Yang ketiga adalah metodologi proyek. Keempat, strategi kolaboratif. Strategi kelima adalah partisipasi. Strategi keenam adalah pelatihan dan kunjungan. Kedelapan pendekatan pengembangan sistem pertanian dan ketujuh strategi lembaga pendidikan.

Menurut Noor (2011:91), kemandirian dalam konteks pemberdayaan masyarakat mengacu pada kemampuan masyarakat



untuk secara progresif memperoleh otonomi dan penentuan nasib sendiri sehingga mampu secara mandiri mengembangkan lingkungan dan dirinya sendiri. Menurut Kartasasmita dalam Tampubolon dkk. (2006:11), pemberdayaan dilakukan melalui dua cara: (a) berupaya melepaskan diri dari rantai kemiskinan dan keterbelakangan, dan (b) memperkuat status lapisan masyarakat dalam hierarki kekuasaan. Dari beberapa definisi terlihat jelas bahwa tujuan pemberdayaan ekonomi adalah untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

## 2. Pemberdayaan Ekonomi

Menurut sebagian besar definisi, ekonomi adalah ilmu sosial yang mengkaji aktivitas manusia yang berhubungan dengan penciptaan, pertukaran, dan konsumsi produk dan jasa. Ekonomi adalah subjek studi yang populer dan sering dikaitkan dengan keuangan pribadi. Istilah Yunani “oikos” (keluarga, rumah tangga) dan “nomos” (aturan, peraturan, dan hukum) adalah asal kata “ekonomi”. Dengan kata lain, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan atau peraturan rumah tangga.

Abraham Maslow menegaskan bahwa ilmu ekonomi adalah suatu disiplin ilmu yang mampu menyelesaikan permasalahan kemanusiaan dengan memanfaatkan seluruh sumber daya keuangan yang ada dalam sistem ekonomi yang efisien dan sukses yang didasarkan pada teori dan prinsip.

Di sisi lain, Robbins menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang perilaku manusia dalam kaitannya dengan tujuan dan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Pertimbangan ekonomi memainkan peran utama dalam kehidupan sehari-hari. Karena setiap orang di dunia pasti akan berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, perekonomian mengatur atau mengurus rumah tangga, sehingga setiap orang yang menikah—terutama kepala keluarga—harus bekerja untuk menunjang pengeluaran keluarga sehari-hari.

Sedangkan definisi dari pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses atau upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi individu, kelompok, atau komunitas tertentu. Ini melibatkan memberikan akses kepada mereka terhadap sumber daya ekonomi, pelatihan, pendidikan, dan dukungan lainnya yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan keterampilan, menciptakan atau meningkatkan penghasilan, serta mengambil peran aktif dalam kegiatan ekonomi lokal atau nasional. Tujuan pemberdayaan ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kelangsungan ekonomi jangka panjang.

Pemberdayaan ekonomi adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, kelompok, atau komunitas untuk mengendalikan dan meningkatkan sumber daya ekonomi mereka

sendiri. Ini mencakup memberikan akses kepada mereka terhadap peluang ekonomi, sumber daya, keterampilan, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelatihan keterampilan, pendidikan keuangan, pemberian modal usaha, akses ke pasar, serta dukungan dalam pengembangan bisnis dan kewirausahaan. Tujuan dari pemberdayaan ekonomi adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pembangunan ekonomi. Melalui pemberdayaan ekonomi, individu dan komunitas dapat menjadi lebih mandiri secara finansial, meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pemberdayaan ekonomi merujuk pada pembangunan ekonomi yang merupakan fokus utama bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, yang pada gilirannya memerlukan strategi-langkah yang dirancang oleh pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia menuju arah yang lebih baik.

Peningkatan kualitas hidup ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, kebutuhan individu, dan kebutuhan akan kebebasan. Oleh karena itu, dalam proses pemberdayaan ekonomi masyarakat, penting untuk memberikan prioritas pada pemenuhan kebutuhan yang mendasar atau pokok. Pemberdayaan ekonomi menurut Sumodiningrat yaitu sebagai berikut :

- a. Perekonomian kerakyatan adalah perekonomian yang dikelola oleh rakyat dan bertumpu pada kemampuan dan kekuatan masyarakat secara keseluruhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b. Tujuan pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah memberdayakan perekonomian kerakyatan melalui perubahan struktural agar kuat, ekspansif, modern, dan berdaya saing tinggi. Perekonomian tradisional menjadi perekonomian modern, perekonomian lemah menjadi perekonomian kuat, dan perekonomian subsisten menjadi perekonomian pasar merupakan contoh transformasi ekonomi struktural. Proses perubahan struktural terdiri dari langkah-langkah berikut: alokasi sumber daya, penguatan kelembagaan, penguatan teknologi, dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- c. Melalui kolaborasi yang erat antara mereka yang terdiferensiasi dan yang belum terdiferensiasi, masyarakat dapat meningkatkan

produksi melalui pemasukan modal sebagai stimulus melalui pemberdayaan masyarakat secara ekonomi.

### **3. Pengertian Ekonomi keluarga**

Ekonomi keluarga adalah studi tentang bagaimana orang berusaha memenuhi kebutuhan mereka melalui tindakan orang yang bertanggung jawab atas kebahagiaan dan kebutuhan mereka. Soekanto (2010) menegaskan bahwa pendapatan bulanan orang tua, kepemilikan kekayaan, kepemilikan fasilitas, dan pekerjaan mereka semuanya menunjukkan keadaan perekonomian keluarga.

Goenawan Sumodiningrat (2017:27) mengartikan ekonomi keluarga sebagai segala kegiatan dan usaha keluarga atau masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang meliputi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Hal ini menyiratkan bahwa sebuah keluarga harus membangun dan mengawasi perekonomian modern dengan mendorong dorongan dan minat terhadap keterampilan dan bisnis.

Ekonomi keluarga menjadi studi ekonomi yang fokus pada unit terkecil dalam sistem ekonomi, yaitu keluarga. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan akan barang dan jasa, keluarga harus mengelola sumber daya mereka yang terbatas, seperti yang kita bahas dalam penelitian ini. Keluarga harus memutuskan jenis pekerjaan atau kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memenuhi tujuan keuangan mereka.

Oleh karena itu, mengingat keterbatasan sumber daya, studi ekonomi keluarga membahas tujuan, aktivitas ekonomi, dan tujuan keuangan keluarga. Ekonomi terlibat dalam perjuangan untuk mengangkat masyarakat keluar dari cengkeraman kemiskinan. Seseorang dapat hidup kaya dan tenang dengan perekonomian yang cukup atau bahkan tinggi, yang meningkatkan kemungkinan bahwa orang lain yang berjiwa tenang juga akan memiliki kehidupan yang lebih baik.

Tidak dapat dipungkiri, salah satu permasalahan yang sering muncul dalam rumah tangga dan berpotensi mempengaruhi derajat kesejahteraan dan keharmonisan dalam keluarga adalah perekonomian. Yusuf Qardhawi mencantumkan kriteria berikut sebagai mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga:

- a. Cukup makan dan memenuhi standar Gizi.
- b. Cukup uang untuk keperluan rumah tangga.
- c. Cukup untuk pengobatan apabila sakit.
- d. Cukup uang untuk menuntut ilmu dan segala perlengkapan.
- e. Cukup air untuk membersihkan badan, pengairan, dan memasak makanan, bersuci dan sebagainya.

Dari penjelasan sebelumnya, bahwa penyediaan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan merupakan prasyarat agar sebuah keluarga dianggap mampu secara ekonomi. Pemberdayaan keluarga dalam konteks ini hanya terfokus pada melakukan ibadah,

Jumlah uang yang diperoleh dan dibelanjakan menentukan status ekonomi sebuah keluarga. Delapan indikator digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan, menurut Badan Pusat Statistik (2007:32–36). Indikator tersebut meliputi pendapatan, kondisi tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, pengeluaran atau konsumsi keluarga, kesehatan anggota keluarga, kemudahan mengakses layanan kesehatan, kemudahan mendaftarkan anak ke sekolah, dan kemudahan memperoleh fasilitas transportasi.

Kesejahteraan ekonomi keluarga tidak hanya terkait dengan kekayaan materi atau kemewahan, tetapi lebih pada harmoni dan keseimbangan dalam kehidupan keluarga. Hal ini berarti bahwa keluarga yang sejahtera bukanlah keluarga yang memiliki segalanya secara materi, tetapi adalah keluarga di mana anggotanya dapat hidup dalam kedamaian, kebebasan dari konflik dan pertengkaran, tanpa tekanan, kecemasan, atau keputusasaan. Berdasarkan klasifikasinya, keluarga dapat dibedakan menjadi lima tipe menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) (2013: 3). Kategori-kategori tersebut adalah sebagai berikut:

a. Keluarga Pra Sejahtera

Keluarga pra-sejahtera adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan paling dasar mereka, yang mencakup makan dua kali atau lebih dalam sehari, berpakaian berbeda untuk bekerja, sekolah, dan bepergian, memiliki lantai yang tidak seluruhnya

terbuat dari tanah, dan menghasilkan uang. kurang dari Rp 1.000.000 per bulan.

b. Keluarga sejahtera I

Kelompok yang mampu memenuhi kebutuhan minimal di bidang agama, sandang, pangan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang sangat mendasar dan mudah dipahami antara lain: minimal dua minggu sekali anggota kelompok makan nasi, ikan, atau kerang; pada akhir tahun, seluruh anggota kelompok mengeluarkan minimal satu buku telepon baru, dengan pendapatan rata-rata bulanan sebesar Rp. 1.000.000 hingga Rp. 2.000.0000.

c. Keluarga sejahtera II,

Selain memenuhi kebutuhan pokoknya, mereka juga mampu memenuhi kebutuhan sosial dan psikologisnya, namun tidak mampu memenuhi kebutuhan perkembangannya, antara lain memiliki penghasilan tetap per bulan minimal Rp. 2.000.000 hingga Rp. 3.000.000, menabung secara konsisten, memenuhi kebutuhan pendidikan formal anak dan menyediakan fasilitas dasar, senantiasa menawarkan hiburan di rumah, memiliki akses terhadap layanan kesehatan, memiliki dan menggunakan transportasi, serta dapat memperoleh pelayanan kesehatan.

d. Keluarga sejahtera III

Keluarga yang memiliki tabungan, kemampuan memenuhi kebutuhan pendidikan formal dan kebutuhan dasar anaknya,



kemampuan mengganti fasilitas hiburan di rumah, dan berpenghasilan antara Rp. 3.000.000 dan Rp. 5.000.0000 per bulan merupakan contoh keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan pembangunan namun masih belum mampu berpartisipasi aktif dalam upaya masyarakat di lingkungan desa atau daerah.

e. Keluarga sejahtera plus

Keluarga yang telah mampu mencapai semua dampak tersebut di atas dan juga mampu secara konsisten terlibat dalam pengembangan kegiatan sosial dan berpartisipasi aktif dalam gerakan tersebut adalah mereka yang mampu mencapai semua dampak tersebut di atas dan juga mempunyai program bulanan. penghasilan lebih dari Rp 5.000.0000.

Agar berhasil mencapai tujuan yang dimaksudkan, harus ada kondisi pemungkin yang mendorong kinerja unggul dan memuaskan. Namun, selalu ada kesulitan atau hambatan yang dapat menghalangi pencapaian dalam upaya apa pun untuk mengejar, meningkatkan, dan mempraktikkan sesuatu. Ilmu Ekonomi menjelaskan bahwa komponen perekonomian keluarga meliputi pendapatan, pengeluaran, dan cara penanganan uang keluarga.

Ada empat isu yang dipertimbangkan ketika menentukan komponen atau faktor yang dapat menghambat status sosial ekonomi keluarga:

a. Sumber penghasilan

Untuk menghidupi sebuah keluarga, pendapatan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti sumber tetap yang diterima sebagai imbalan atas jasa tenaga kerja.

b. Besarnya penghasilan

Jumlah uang tunai, produk, atau kekayaan yang akan digunakan seluruh keluarga untuk memenuhi kebutuhannya disebut pendapatan keluarga. Menurut pendapat tertentu, status sosial ekonomi suatu keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jumlah anggota keluarga, sumber dan besarnya pendapatan, serta pengeluaran keluarga. Setiap rumah tangga mempunyai sumber pendapatan yang berbeda-beda, baik dari pekerjaan sampingan maupun pekerjaan konvensional.

c. Besarnya atau jumlah anggota keluarga

Permintaan suatu rumah tangga meningkat baik jumlah maupun nilainya seiring dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga. Oleh karena itu, pendapatan keluarga harus mencukupi kebutuhan semua orang. Setiap anggota keluarga perlu bekerja atau mempunyai usaha sampingan agar dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam upaya mendongkrak pendapatan keluarga.

#### d. Penggunaan Penghasilan Keluarga

Perekonomian keluarga harus dikelola dengan pertimbangan yang matang untuk membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tambahan guna menunjang kebutuhan masing-masing anggota. Semua pilihan ini perlu disesuaikan dengan sumber daya atau pendapatan keluarga agar tidak terjerumus ke dalam siklus pengeluaran yang berlebihan. Tindakan penipuan dan aktivitas kriminal lainnya mungkin didorong oleh keangkuhan atau bahkan ketidakcukupan.

Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota keluarga, sumber dan besarnya pendapatan, serta kebiasaan belanja keluarga. Oleh karena itu, penting bagi sebuah keluarga untuk mengalokasikan uangnya sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, dan pendidikan harus diutamakan.

Keadaan sosial ekonomi suatu keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jumlah anggota keluarga, sumber dan besarnya pendapatan, serta kebiasaan belanja keluarga. Oleh karena itu, penting bagi sebuah keluarga untuk mengalokasikan uangnya sesuai dengan kebutuhannya saat ini. Kebutuhan dasar keluarga seperti pangan, sandang, dan pendidikan harus diutamakan.

## C. Pasar Kaget

### 1. Pengertian Pasar

Sebagai makhluk sosial, manusia pada hakikatnya hidup berkelompok dimana mereka dapat berkolaborasi, belajar, dan saling mendukung dalam mencapai tujuan hidupnya. Masyarakat mula-mula hidup berkelompok, kemudian berangsur-angsur berorganisasi menjadi komunitas-komunitas dan akhirnya menetap di permukiman. Pasar merupakan salah satu ruang publik lingkungan (Hidayat, 2017). Pasar hanyalah hasil interaksi antara penjual dan pembeli yang berada di pasar suatu komoditas atau jasa tertentu untuk akhirnya menentukan harga keseimbangan berdasarkan kuantitas yang ditransaksikan dan harga pasar.

Pasar memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar kebutuhan yang tidak mampu Anda penuhi sendiri dapat dipenuhi oleh pasar. Pelanggan atau pembeli biasanya datang ke pasar untuk berbelanja dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dengan membawa sejumlah uang tunai untuk menutupi harga barang yang mereka beli. Pasar adalah komponen dari berbagai struktur, organisasi, protokol, interaksi sosial, dan infrastruktur di mana masyarakat dapat membeli komoditas, jasa, dan tenaga kerja satu sama lain dengan uang tunai. Alat pembayaran yang sah untuk transaksi pasar biasanya berupa uang. Pasar berbeda dalam hal ukuran,

ruang lingkup, jangkauan geografis, jenis, dan berbagai komunitas manusia, komoditas, dan jasa yang dipertukarkan di dalamnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri, 2007) mendefinisikan pasar sebagai tempat pertukaran barang dan jasa antara pembeli dan penjual, serta sebagai sarana bagi masyarakat untuk terlibat secara sosial dan budaya serta berkembang secara ekonomi. Sementara itu, Sa'ad Marthon berpendapat bahwa pasar adalah alat untuk mempertemukan masyarakat. untuk melakukan bisnis antara pembeli dan pemasok produk dan jasa.

Menurut pemahaman pasar, pasar terdiri dari tiga komponen utama. Mursid (1997) menyatakan bahwa tiga komponen utama adalah sebagai berikut:

- a. Orang dengan segala keinginan dan kebutuhannya adalah konsumen.
- b. Daya beli merupakan variabel yang mempunyai kemampuan untuk mengubah keinginan menjadi permintaan. Jika masyarakat tidak mempunyai cukup uang untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya, maka hal tersebut tidak akan menjadi permintaan.
- c. Perilaku pembelian. Ketika terlibat dalam aktivitas pasar, seperti kebiasaan belanja, perubahan preferensi terhadap barang atau jasa tertentu, waktu tunggu produksi dan pembelian, dan variasi harga atau nilai, perilaku terkait dengan gaya hidup masyarakat.

Pedagang pasar adalah orang atau organisasi yang terlibat dalam pembelian dan penjualan produk dan jasa di pasar terbuka. Lokasi utama mereka untuk melakukan transaksi perdagangan adalah pasar. Pedagang ini berfungsi sebagai pihak yang menyediakan barang atau jasa untuk diperdagangkan di pasar. Meskipun kepemilikan barang yang mereka jual tidak selalu bersifat fisik, pedagang memiliki hak untuk memasarkan barang-barang tersebut kepada konsumen.

Pasar dapat dibagi menjadi dua kategori utama berdasarkan perkembangannya: pasar tradisional dan pasar modern. Pasar konvensional adalah tempat jual beli yang dimiliki dan dioperasikan oleh berbagai organisasi, termasuk inisiatif masyarakat lokal, badan usaha swasta, koperasi, dan pemerintah. Sementara itu, manajemen mengelompokkan pasar menjadi dua segmen, yaitu:

a. Pasar Tradisional

Pasar yang banyak bermunculan di masyarakat dikenal dengan pasar tradisional. Feriyanto (2006) menyatakan bahwa pasar tradisional pada dasarnya adalah pasar yang berkembang sebagai respon terhadap permintaan konsumen dan kebutuhan masyarakat luas yang membutuhkan lokasi untuk menjual barang-barang yang diproduksinya serta kebutuhan masyarakat akan barang-barang tertentu untuk keperluan sehari-hari.

Pasar tradisional didefinisikan sebagai pasar yang dibangun dan dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah. Pengertian ini juga mencakup kerjasama dengan pihak swasta yang mempunyai tempat usaha berupa toko, kios, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha kecil, modal kecil, dan proses pembelian. dan menjual barang dagangan melalui tawar-menawar. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2007 memuat definisi tersebut.

Selain menjadi pusat kegiatan ekonomi, pasar tradisional juga menumbuhkan hubungan sosial yang erat di antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemasok, pembeli, dan pedagang, berkat pola hubungan ekonomi yang berkembang di sana. Fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya masyarakat bersosialisasi satu sama lain dalam ekonomi pasar tradisional.

Menteri Perdagangan RI mengklaim pelaku ekonomi skala menengah, kecil, dan mikro menjual sebagian besar kebutuhan pokok di pasar konvensional. Industri rumah tangga (industri rakyat), perajin, petani, dan nelayan termasuk di antara peserta pasar tradisional.

Adapun Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Badan Usaha

Perdagangan, yang diterbitkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia:

1. Pasar didasarkan pada kelas mutu pelayanan dan menurut sifat pendistribusiannya adalah :
  - a. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh sektor publik, komersial, atau koperasi dan berbentuk pusat perbelanjaan, mal, supermarket, department store, dan sejenisnya. Mereka dicirikan oleh praktik manajemen yang modern, fokus pada layanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen di satu sisi, modal yang relatif kuat, dan harga yang ditetapkan.
  - b. Pasar tradisional adalah pasar yang didirikan dan dijalankan oleh sektor publik atau komersial, koperasi, atau organisasi non-pemerintah. Mereka menampilkan ruang usaha seperti toko, kios, stan, dan tenda yang dimiliki atau dioperasikan oleh pedagang kecil dan menengah serta koperasi dengan persyaratan modal sederhana. Selain itu, tawar-menawar digunakan dalam proses jual beli.
  - c. Pasar grosir adalah pasar di mana perdagangan dilakukan di tingkat grosir.
  - d. Pasar eceran adalah tempat dilakukannya kegiatan perdagangan skala kecil.



- e. Supermarket, sering juga disebut super market, adalah toko yang bidang usaha utamanya adalah penjualan langsung kebutuhan sehari-hari kepada pelanggan dengan menggunakan metode layanan pelanggan.
2. Pasar digolongkan menurut skala luas wilayahnya yaitu :
- a. Skala kurang dari 8000 m<sup>2</sup> disebut pasar kecil.
  - b. Skala 8000 m<sup>2</sup> - 10.000 m<sup>2</sup> disebut pasar sedang.
  - c. Skala lebih dari 10.000 m<sup>2</sup> disebut pasar berskala besar.

Peraturan Presiden Republik Indonesia lebih lanjut mengatur bahwa lokasi pendirian pasar tradisional harus mematuhi aturan berikut:

- 1) Mempertimbangkan status sosial ekonomi lingkungan sekitar, keberadaan toko modern, pusat perbelanjaan, pasar tradisional, dan koperasi di wilayah yang bersangkutan, selain usaha kecil.
- 2) Untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) ruang penjualan pasar tradisional, paling sedikit tersedia satu tempat parkir untuk kendaraan roda empat.
- 3) Harus tersedia fasilitas yang menjamin pasar tradisional menjadi tempat umum yang higienis, aman, tertib, dan nyaman.

b. Pasar Modern

Pasar yang bersifat modern adalah pasar yang di dalamnya diperjualbelikan produk-produknya dengan harga wajar dan dengan pelayanan mandiri (self-service). Pasar ini diadakan di plaza, supermarket, mall, hypermart, dan lokasi kekinian lainnya. Pasar modern mirip dengan pasar tradisional karena pembeli dan penjual tidak bertransaksi secara langsung; sebaliknya, pembeli memeriksa label harga (barcode) pada barang, yang terletak di gedung, dan barang tersebut dilayani secara mandiri (swalayan) atau oleh asisten penjualan. Selain barang habis pakai seperti buah, sayuran, dan daging, sebagian besar produk lain yang dijual adalah barang tahan lama. Berikut ciri-ciri pasar masa kini:

- 1) Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja contohnya dengan adanya *e-commerce* seperti shopee, tokopedia, tiktokshop, dan lain-lain.
- 2) Alat pembayaran bisa non tunai seperti transfer, dan qris.
- 3) Penjual dan pembeli tidak harus bertemu langsung.
- 4) Pada situasi tertentu seperti di supermarket harga tidak bisa menawar
- 5) Harga sudah tertera dan diberi barcode
- 6) Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama
- 7) Berada dalam bangunan dan pelayanan dilakukan sendiri
- 8) Ruangan ber-AC dan nyaman tidak terkena terik matahari

9) Tempat bersih

10) Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang.

## 2. Pengertian Pasar Kaget

Pasar memainkan peran penting dalam kehidupan individu. Terdapat pasar kuno dan modern di hampir setiap kawasan pemukiman. Perencana kota dapat menggunakan pasar sebagai strategi pembangunan perkotaan karena mereka dapat mengubah ruang terbuka kota menjadi area publik, sehingga meningkatkan kualitas sosial (Janssens & Sezer, 2015).

Pasar kaget menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pasar sementara yang dibuka pada saat hajatan atau pertemuan besar. Namun bagi masyarakat Pesisir Rumbai, pasar kaget merupakan pasar tak terencana yang muncul pada hari tertentu dan momen tertentu akibat simbiosis mutualisme.

Menurut Noviafitri dkk. (2023), pasar kaget adalah salah satu jenis pasar konvensional yang muncul di masyarakat dan mempunyai efek menguntungkan dalam menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menciptakan lapangan kerja yang sangat menguntungkan. Kebanyakan orang mengira pasar kaget hanyalah pasar biasa dengan aktivitas pasar yang berumur pendek. Ada platform penjualan yang bersifat semi permanen atau

tidak permanen, dan kegiatannya hanya diadakan pada jam-jam tertentu dalam sehari.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan pihak swasta yang mempunyai tempat usaha berupa toko, kios dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh usaha kecil dan menengah, pedagang menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.” Pasal 1 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern mengatur pasar kaget sebagai salah satu jenis pasar tradisional. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengendalian pasar tidak akan optimal tanpa adanya keterlibatan pemerintah atau badan usaha.